

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Spencer & Spencer yang dikutip oleh Sudarmato (2015:53) kompetensi adalah :

“Kompetensi merupakan pengetahuan (*knowledge competencies*) dan keahlian (*skill competencies*) cenderung lebih (*visible*) dan relatif berbeda dipermukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia serta mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.”

Menurut Marwansyah (2016:35) menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai karakteristik utama yang dimiliki seseorang, yang menyebabkan ia mampu berkinerja efektif atau unggul dalam sebuah pekerjaan.

Wirawan (2015:1) menyebutkan definisi dari sumber daya manusia yaitu:

“Sumber daya manusia merupakan orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Sumber daya manusia merupakan dasar dan kunci dari semua sumber daya organisasi. Sumber – sumber lainnya hanya dapat diperoleh dan berfungsi jika organisasi mempunyai pengetahuan, keterampilan, kompetensi, kewirausahaan dan kesehatan fisik jiwa yang prima, bertalenta, mempunyai

otot kerja dan motivasi kerja tinggi yang dapat membuat organisasi berbeda antara sukses atau gagal. Efektivitas dan efisien sumber – sumber organisasi lainnya hanya dapat dicapai kalau sumber daya manusianya berkualitas.”

Menurut Kasmir (2016:3) sumber daya manusia merupakan motor penggerak seluruh aktivitas perusahaan. Pengertian kompetensi sumber daya manusia dijelaskan oleh Wirawan (2015:9) adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif.

Donni Juni Priansa (2018:252) menyatakan bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Dengan demikian, organisasi tidak hanya berfokus pada kinerja dan produktivitas kerja yang handal melalui pembangunan pegawai berbasis kompetensi.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dikatakan bahwa Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Standar Kompetensi PNS adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

Dengan beberapa definisi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah seperangkat karakteristik terdiri dari pengetahuan, keterampilan, perilaku dan pengalaman atas individu yang dapat

dinilai dan diukur sebagai penggerak suatu peran secara efektif guna keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan tujuannya.

2.1.1.1 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa indikator kompetensi sumber daya manusia menurut Hutapea dan Toha dalam Susetyorini (2018) mengatakan bahwa terdapat 4 indikator kompetensi sumber daya manusia diantaranya adalah:

- 1) Pengetahuan
- 2) Kemampuan
- 3) Pengalaman
- 4) Perilaku Individu

Adapun penjelasan terkait indikator – indikator yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan

Informasi yang dimiliki seorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang yang digelutinya. Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan.

- 2) Kemampuan

Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang dengan baik dan maksimal.

- 3) Pengalaman

Adanya pengalaman yang dimiliki oleh karyawan akan meningkatkan kompetensi, seorang karyawan jika memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaan maka akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuannya.

4) Perilaku individu

Pola tingkah laku karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan. Apabila karyawan memiliki sifat yang mendukung dalam pencapaian organisasi, maka seluruh tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan baik.

Menurut Spencer dalam Sudarmanto (2015:53) ada beberapa komponen kompetensi sumber daya manusia diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Motif (*Motive*)

Hal – hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan suatu tindakan.

2) Sifat (*Traits*)

Karakteristik fisik dan respon – respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi.

3) Konsep Diri (*Self-concept*)

Sikap dan juga nilai – nilai yang dimiliki seseorang.

4) Pengetahuan (*Knowledge*)

Informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu yang bersifat kompleks.

5) Keterampilan (*Skill*)

Kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik dilakukan secara fisik ataupun mental.

Menurut Spencer & Spencer dikutip dalam Sudarmanto (2015:53) dikatakan bahwa konsep diri (*self-concept*), watak/sifat (*traits*) dan motif kompetensi lebih tersembunyi (*hidden*), dalam (*deeper*) dan berbeda pada titik sentral kepribadian seseorang juga cenderung sulit untuk dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan. Sedangkan kompetensi pengetahuan (*knowledge competencies*) dan kemampuan (*skill*) cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berbeda dipermukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia serta mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

2.1.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Lilis Puspitawati dan Siri Dewi Anggadini (2011:1) mengatakan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Pengertian lain menurut Azhar Susanto (2017:22) sistem adalah kumpulan/*group* dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dikatakan pula oleh Marshall B. Romey & Paul Jhon Steinbart (2014:3) mengenai definisi sistem yaitu suatu elemen yang saling terhubung dengan elemen yang lainnya dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan perusahaan.

Moh Mahsun dkk (2016:92) memberikan pengertian tentang sistem akuntansi keuangan daerah adalah metode dan prosedur penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan di suatu pemerintah daerah.

Adapun pengertian lain menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Solihin (2017:58) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Abdul Halim dalam buku Yoyo Sudaryo (2017:34) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan satu skema yang menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Setelah mendapati beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu jaringan kerja yang terdiri dari prosedur/bagian yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sehingga menghasilkan suatu informasi laporan keuangan yang

digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak ekstern atau intern pemerintah daerah.

2.1.2.1 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:59) sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

- 1) Pencatatan
- 2) Pengikhtisaran
- 3) Pelaporan

Penjelasan indikator sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan
 - a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
 - b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
 - c. Memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
- 2) Pengikhtisaran
 - a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang membuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
 - b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun – akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
 - c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.

- d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup di posting ke akun – akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
 - e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
 - f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
- 3) Pelaporan

Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

Adapun menurut Delone dan McLean (2003) mengatakan bahwa dalam mengukur kesuksesan suatu sistem informasi terdapat beberapa indikator yang berkaitan. Adapun indikator yang dimaksud diantaranya adalah:

- 1) Kualitas Sistem (*System Quality*)
- 2) Kualitas Informasi (*Information Quality*)
- 3) Kualitas Pelayanan (*Service Quality*)
- 4) Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)
- 5) Manfaat Bersih (*Net Benefit*)

Penjelasan terkait indikator – indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas sistem merujuk kepada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan serta prosedur sistem informasi yang dapat menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2) Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Kualitas informasi mencakup dari keakuratan informasi (*accuracy*), kelengkapan informasi yang digunakan (*complete*), ketepatan waktu informasi dan up to date (*timelines*) dan relevan (*relevance*).

3) Kualitas Pelayanan (*Service Quality*)

Kualitas pelayanan mencakup penilaian yang dipersepsikan dari hasil membandingkan harapan pengguna terhadap pelayanan yang diterimanya.

4) Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Kepuasan pengguna mengenai tanggapan dan kesan pengguna terhadap layanan yang diberikan oleh sistem yang mencakup respon dan timbal balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi.

5) Manfaat Bersih (*Net Benefit*)

Sistem informasi mampu menghasilkan informasi yang berkualitas untuk penggunaannya yang mampu memberikan nilai bagi pengguna dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:13) laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No 1 2019:1) pengertian laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Adapun pengertian laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:19) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Merupakan gabungan dari laporan keuangan BPKD yang ada dalam pemerintah daerah itu sesuai kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.”

Menurut Nyor (2013:274) dikutip dalam buku Harahap & Sofyan (2018:28) mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah:

Financial reporting quality therefore, relates to the accuracy with which reported financials of a firm reflects its operating performance and how useful they are in forecasting future cash flow.... Such wualities include but are not limited to understandability, relevance, concistency, comparability, reliability and objectivity.

Menurut Baldric Siregar (2015:12) mendefinisikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk penyajian informasi laporan keuangan yang terstruktur mengenai

posisi dan kinerja keuangan yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atasnya untuk pengambilan keputusan berbagai pihak berkepentingan.

2.1.3.1 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dwi Ratmono (2017:15) mengatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah diantaranya:

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dibandingkan
- 4) Dapat dipahami

Adapun penjelasan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Relevan

Relevan berarti laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya yaitu :

- a. Laporan keuangan memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya (*feedback value*).
- b. Laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi masa yang akan datang (*predictive value*).
- c. Laporan keuangan disajikan tepat waktu (*timeliness*) sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.

d. Penyajian laporan keuangan memuat informasi yang selengkap mungkin (*completeness*).

2) Andal

Andal yang dimaksud adalah informasi laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral.

a. Jujur artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya tetap mempunyai kesimpulan yang sama.

c. Netral mengartikan bahwa laporan keuangan memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak memihak kepada kebutuhan tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan memuat informasi yang didalamnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lainnya dengan syarat menetapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi periode sebelumnya, maka perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4) Dapat dipahami

Laporan keuangan perlu menyajikan informasi yang dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang baik dibutuhkan pula kompetensi sumber daya manusia yang membantu dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Semakin meningkatnya kompetensi sumber daya manusia maka secara otomatis kualitas laporan keuangan pun akan meningkat. Ini yang menyebabkan kompetensi sumber daya manusia dianggap memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014:76) mengatakan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah merupakan sebuah hal yang mendasari LKPD tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia aparatur yang sedikit

memiliki kompetensi yang memadai dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Mardiasmo (2018:135) menyatakan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

“Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal – hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan tepat waktu. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dan andal dalam hal pengambilan keputusan.”

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Listiyani dkk (2020) dan Siti Irafah dkk (2020), mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:27) mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila terdapat masalah pada satu bagian dari siklus akuntansi tersebut dapat berakibat kepada laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

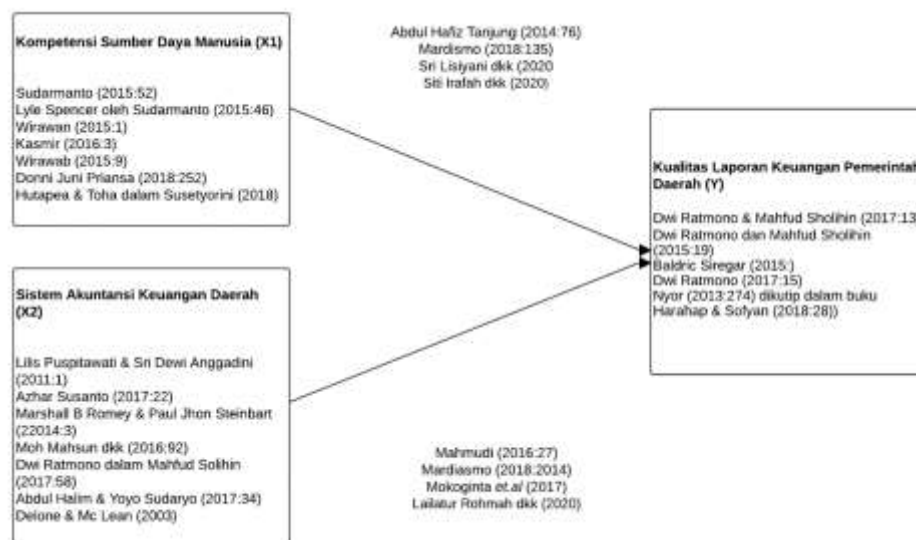
Adapun pendapat menurut Mardiasmo (2018:2014) mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mokoginta *et.al* (2017) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan dengan sudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 secara menyeluruh, melaksanakan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah, menerapkan basis akrual dan menggunakan mekanisme pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Adapun penelitian lain yang telah dilakukan oleh Lailatur Rohmah dkk (2020) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Satuan kerja

perangkat daerah yang mampu menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara cepat, terjamin keamanannya, hasilnya berkualitas dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas pula.

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dikemukakan maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2 1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2021:99) mengatakan bahwa hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan uraian dan paradigma pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh besar terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H₂ : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh besar terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.